

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemandirian merupakan bagian dari tumbuh kembang individu. Individu yang mandiri ditandai dengan adanya kemauan dan kemampuan untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidup, minimalnya secara sah, wajar, dan bertanggung jawab. Kemandirian tidak identik dengan kehidupan individualistik yang mengisolasi diri dari orang lain dan lingkungan sekitar (Hurlock, 1980:174).

Kemandirian anak merupakan suatu keadaan yang dapat berdiri sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. Anak yang mandiri adalah anak yang mampu menjalankan tugas kehidupan sehari-harinya sesuai dengan tingkat dan tugas perkembangannya dengan penuh rasa kesadaran dan tanggung jawab baik terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat (Barnadib, 1987:72).

Kemandirian semakin sulit terealisasi karena perkembangan permasalahan sosial anak yang semakin kompleks. Penyebab utamanya adalah rendahnya fungsi dan peran sosial anak. Karenanya menunjukkan bahwa penanganan terhadap permasalahan sosial anak masih memerlukan perhatian secara komprehensif dari seluruh elemen masyarakat.

Dalam proses tumbuh kembangnya, anak dihadapkan dengan beberapa permasalahan sosial. Permasalahan sosial yang paling rentan adalah rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi orang tua sehingga kebutuhan anak secara fisik, sosial, intelektual, mental, dan spiritual tidak terpenuhi.

Kemiskinan merupakan penyebab utama terlantarnya hak-hak anak. Seperti diketahui kemiskinan yang terjadi di Indonesia mengarah kepada kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan primer mereka, dan juga kesulitan mereka dalam mendapatkan kehidupan yang layak. Kemiskinan yang terjadi di Indonesia tidak hanya memberikan dampak negatif pada orang dewasa saja, tapi juga anak-anak. Dampak yang terjadi pada anak justru lebih berbahaya daripada yang timbul pada orang tua, karena pada anak dampak tersebut menyebabkan kerusakan jangka panjang. Hak mereka untuk memperoleh pendidikan dan masa kecil yang bahagia, berkualitas dan yang layak didapatkan oleh anak-anak menjadi terampas karena kondisi ekonomi keluarga (Suharto, 2005:153).

Anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian dari keluarganya biasanya menghadapi permasalahan sosial dalam menjalani kehidupannya. Beberapa permasalahan sosial yang dialami anak misalnya: sikap pemalu, perasaan minder, pendiam, penakut, menyendiri, suka melamun, bandel, keras kepala, agresif, suka bertengkar, mengganggu teman, suka membantah, sombong, kurang bertanggung jawab, kurang disiplin, tidak percaya diri, lamban dalam berpikir, kurang berkonsentrasi, dan sebagainya. Semua permasalahan tersebut mengakibatkan anak mengalami hambatan dalam proses belajar.

Permasalahan yang telah diutarakan di atas, termasuk pada kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). PMKS yaitu seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang mengalami tidak dapat melaksanakan fungsi dan peran sosial karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan. Orang yang mengalami gangguan ini tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup (jasmani,

rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan, dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, misalnya terjadi bencana alam.

Permasalahan anak tersebut merupakan salah satu dari 27 Jenis kriteria PMKS. Terhambatnya kesejahteraan dan keterlantaran anak dapat disebabkan oleh ketidakmampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Kategori anak terlantar menurut Undang-Undang RI No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yaitu orang tua yang melalaikan semua kewajibannya pada saat seorang anak belum mencapai usia 21 tahun, anak yang kehilangan salah satu atau kedua orang tuanya, dan anak yang mendapat perlakuan kurang wajar. Keadaan tersebut menyebabkan kebutuhan jasmani, rohani, maupun sosial anak tidak terpenuhi.

Permasalahan yang terjadi pada anak harus segera diatasi agar tidak terjadi keterlantaran. Hal ini mengingat anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki nilai strategis dan merupakan potensi bagi bangsa untuk membentuk dan mewujudkan manusia yang berkualitas. Oleh sebab itu, diperlukan perhatian khusus demi mewujudkan suatu kondisi kehidupan yang memungkinkan anak tumbuh dan berkembang secara wajar (PUHA, 2009).

Fenomena ini semakin menakutkan apabila menilik data Biro Pusat Statistik dan Departemen Sosial RI yang menunjukkan bahwa komposisi masyarakat yang terlantar umumnya terdiri dari anak-anak dan lanjut usia. Pada tahun 2006 terdapat 78,96 juta anak di bawah usia 18 tahun, 35,5% dari total seluruh

penduduk Indonesia. Sebanyak 40% atau 33,16 juta diantaranya tinggal di perkotaan dan 45,8 juta sisanya tinggal di pedesaan. Sebagian besar anak-anak ini berasal dari keluarga miskin dan tertinggal, yang tidak mempunyai kemampuan untuk memberdayakan dirinya, sehingga rentan terhadap kekerasan, eksploitasi, ketimpangan gender, perdagangan anak dan lain-lain. Menurut laporan Depsos pada tahun 2004, sebanyak 3.308.642 anak termasuk ke dalam kategori anak terlantar.

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masalah keterlantaran anak baik secara ekonomi, sosial, maupun psikologis berada di kawasan pedesaan. Populasi tersebut diperkirakan akan terus meningkat sejalan dengan perubahan dan perkembangan sosial yang terjadi dewasa ini.

Permasalahan yang terjadi harus segera diatasi bersama-sama karena permasalahan ini merupakan tugas bersama baik lingkungan keluarga, masyarakat, maupun pemerintah. Penanganannya harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan. Seorang anak dikatakan terlantar apabila tidak terpenuhi kebutuhannya sehingga berdampak terhadap perkembangannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan pada usia anak sangat penting karena menentukan persiapan anak menuju tahap perkembangan berikutnya. Jadi, apabila kebutuhan anak tersebut tidak terpenuhi maka dapat mengakibatkan anak menjadi terlantar.

Salah satu solusi yang dapat menghilangkan keterlantaran dan meningkatkan fungsi dan peran sosial anak adalah kebutuhan akan pendidikan.

Kebutuhan pendidikan bagi seorang anak dapat membantu tahap perkembangannya (Mappadjantji, 2005:319).

Salah satu contohnya pendidikan dibutuhkan oleh anak sekolah yang berusia antara 9 hingga 12 tahun yang sedang mengalami perkembangan fisik, intelektual, moral, minat, dan kepribadian. Melalui pendidikan, anak pada usia ini akan mampu bersosialisasi.

Melalui sosialisasi, anak akan mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai sebagai dasar pembentukan kepribadiannya. Oleh sebab itu, dapat diasumsikan bahwa sosialisasi anak di lingkungan keluarga dan sekolah berpengaruh terhadap pola tingkah laku selanjutnya. Dengan demikian, apabila anak pada tahap pendidikan dasar mengalami hambatan dalam proses sosialisasinya, maka anak tersebut akan mengalami hambatan pula dalam fungsi dan peran sosialnya sehingga mengakibatkan tidak akan memiliki sikap kemandirian. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Hurlock (1979) bahwa sikap seseorang tidak hanya ditentukan oleh pribadi orang yang bersangkutan, tetapi juga ditentukan oleh faktor-faktor lingkungan, artinya sikap orang-orang di sekelilingnya terhadap diri orang yang bersangkutan.

Proses pertumbuhan dan perkembangan seorang anak tergantung pada kemampuan lingkungan sosial, terutama keluarganya. Hal ini sejalan dengan hak-hak anak sebagaimana yang tercantum pada UU RI No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Bab II pasal 2 yang menyebutkan hak-hak anak sebagai berikut ini.

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang secara wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya. Sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat perkembangannya secara wajar.

Oleh karena itu, untuk mendapatkannya diperlukan pelayanan pendidikan tertentu sehingga anak kembali memperoleh kepentingan perawatan dan bimbingan yang memadai. Usaha memperoleh kesejahteraan dan pekerjaan sosial merupakan perwujudan upaya masyarakat dalam meningkatkan keberfungsian sosial serta memecahkan masalah-masalah sosial. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa permasalahan sosial pada anak yang berupa keterlantaran merupakan akibat dari masalah sosial yaitu terjadinya ketidakberfungsian sosial serta masalah sosial dalam kategori tingkah laku menyimpang.

Langkah nyata yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi hal ini adalah menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah (PLS). PLS sebagai salah satu subsistem pendidikan nasional, sejauh ini dianggap sebagai solusi yang tepat. Keberadaan PLS sangat strategis dalam menjawab masalah anak terlantar tersebut di atas dengan syarat adanya keterwujudan jalinan yang erat antara pihak keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah. PLS terdiri atas berbagai jenis satuan pendidikan dengan beragam pola, sasaran, dan tujuan pendidikan yang salah satu di antaranya adalah adanya program pelatihan. Dalam UU No. 20 Tahun 2003 pasal 26 ayat 5 disebutkan bahwa:

Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Sejalan dengan itu, Wasbodo (1999: 22) memberikan pengertian mengenai pelatihan sebagai berikut ini.

Pelatihan merupakan salah satu praktek bagi sumber daya manusia yang berfokus pada identifikasi, pengkajian serta melalui proses belajar yang terencana berupaya untuk membantu mengembangkan kemampuan agar dapat melakukan pekerjaan di masa ini atau di masa yang akan datang.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa dalam sebuah pelatihan terdapat kegiatan pembinaan, bimbingan sosial, dan pelayanan sosial. Salah satu bentuk pelatihan pada jalur PLS yaitu pelatihan terpadu. Pelatihan terpadu diselenggarakan dalam bentuk bimbingan sosial dan pembinaan pelayanan kesejahteraan.

Sangat sulit untuk mencari definisi yang tepat tentang pelatihan terpadu. Namun demikian definisi pelatihan terpadu menurut *The National Academic of Sport Medicine* dapat dijadikan salah satu acuan. Menurut lembaga yang fokus terhadap olah raga ini, pelatihan terpadu merupakan suatu program pengkondisian kembali dan pengrehabilitasian kembali yang dapat dilakukan terhadap semua klien dengan berbagai tujuan.

Sementara itu, dilihat dari sudut pandang orientasi pelatihannya, Sudjana (2007:9) menyebutkan bahwa:

Dilihat dari titik berat orientasi programnya, pelatihan dapat dibagi menjadi tiga kategori. Pertama, pelatihan yang berorientasi kepada kepentingan lembaga penyelenggara pelatihan. Pelatihan ini direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi oleh lembaga penyelenggara pelatihan dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan lembaga itu sendiri. Kedua, pelatihan

yang dilaksanakan dengan orientasi untuk memenuhi kebutuhan sasaran dan atau masyarakat yang menjadi layanan suatu lembaga. Kebutuhan sasaran dapat mencakup kebutuhan belajar, kebutuhan pendidikan, atau kebutuhan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan hidup sasaran dan/atau masyarakat. Ke dalam pelatihan ini termasuk pembinaan atau peningkatan kemampuan dalam lapangan kerja dan/atau dunia usaha yang mencakup bidang pertanian, industry rumah tangga, kesehatan, keluarga berencana, koperasi, perdagangan, dan lain sebagainya. Ketiga, pelatihan yang dilaksanakan dengan berorientasi untuk memenuhi kebutuhan individu, lembaga, dan/atau komunitas tertentu.

Pada pelaksanaan pelatihan terpadu untuk meningkatkan fungsi dan peran sosial anak di RPSPA Garut terdapat unsur pengkondisian kembali, dalam hal ini mengkondisikan kembali fungsi dan peran sosial anak, pengrehabilitasian kembali. Dilihat dari sudut orientasi pelatihan, pada pelatihan terpadu untuk meningkatkan fungsi dan peran sosial anak di RPSPA Garut terdapat orientasi pelatihan berupa pembinaan atau peningkatan kemampuan.

Berdasarkan pendapat dari *The National Academic of Sport Medicine* dan berdasarkan pendapat Sudjana tentang orientasi pelatihan, penulis mengambil kesimpulan definisi pelatihan terpadu yakni merupakan program pelatihan pengkondisian kembali dan pengrehabilitasian kembali dengan orientasi untuk memenuhi kebutuhan individu dalam upaya meningkatkan kemampuannya baik dalam belajar maupun kehidupan sosial yang dilaksanakan secara terprogram dan berkesinambungan.

Kegiatan ini diberikan kepada anak yang mengalami masalah perilaku dan hambatan penyesuaian diri yang disebabkan hambatan ketidakberfungsian sosial seperti masalah sosial, ekonomi, psikologis, pedagogis, dan budaya keluarga. Melalui kegiatan ini, anak diharapkan mempunyai peningkatan fungsi dan peran sosial. Fungsi dan peran sosial merupakan kemampuan seseorang dalam

menjalankan peran sesuai dengan status yang disandanginya. Indikator anak telah melakukan fungsi sosialnya dengan baik yaitu apabila anak memiliki pola-pola tingkah laku yang baik dan wajar atau bisa disebut bertingkah laku sebagai seorang anak dalam hubungannya dengan orang lain di lingkungan sekitarnya, sedangkan anak dapat dianggap telah menjalankan peran sosialnya apabila anak tersebut telah melaksanakan hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya.

Dalam penyelenggaraannya, pelatihan terpadu menangani kondisi anak yang memiliki permasalahan dengan fungsi dan peran sosial anak. Jenis-jenis permasalahan tersebut telah dikemukakan di bagian awal. Kegiatan pelatihan terpadu mempunyai sasaran yang ingin dicapai. Sasaran dari penyelenggaraan pelatihan terpadu yaitu siswa tingkat SD yang berusia antara 9–12 tahun yang duduk di kelas IV, V, dan VI serta mereka yang mengalami hambatan perkembangan fungsi dan peran sosial sehingga tidak memiliki sikap kemandirian. Pelatihan terpadu merupakan pelatihan yang menekankan pada pentingnya partisipasi dan keterlibatan tri pusat pendidikan, yaitu keluarga, pemerintah, dan masyarakat dalam proses pembinaannya.

Ironisnya, hasil pengamatan menunjukkan penyelenggaraan pelatihan belum menunjukkan keberhasilan peningkatan fungsi dan peran sosial anak. Dalam pelaksanaannya masih ditemukan kelemahan dan kekurangan pada pengelolaan pelatihan, baik dalam perencanaan, proses pelaksanaan, dan evaluasi. Kelemahan lainnya yaitu dari sisi penggunaan metode, bahan ajar atau materi yang belum tersusun, dan media pembelajaran yang kurang memadai.

Kelemahan ini disebabkan oleh pembinaan dan bimbingan sosial yang selama ini dilaksanakan oleh pengelola yang kurang berorientasi pada peningkatan fungsi dan peran sosial serta kemandirian anak secara optimal dan efektif. Hal ini disebabkan oleh empat faktor. *Pertama*, terbatasnya pengetahuan dan kemampuan para instruktur dan pekerja sosial. *Kedua*, pengelola belum memiliki rancangan modul atau materi bahan ajar. *Ketiga*, tidak adanya perimbangan jumlah pekerja sosial dengan jumlah anak sasaran pelatihan. *Keempat*, belum memiliki rancangan instrumen seleksi dan penyusunan instrumen alat evaluasi secara komprehensif sesuai dengan kebutuhan. Hal-hal tersebut mengakibatkan penyelenggaraan pelatihan dalam rangka peningkatan fungsi dan peran sosial anak dalam membina kemandirian masih belum optimal.

B. Identifikasi Masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan pelatihan dapat diidentifikasi sebagai berikut ini.

- a. Kompleksnya permasalahan sosial anak yang terus berkembang dewasa ini, baik yang dilatarbelakangi ketidakmampuan sosial, ekonomi, psikologi, dan pedagogi mengakibatkan rendahnya fungsi dan peran sosial anak sehingga berimbas pada rendahnya kemandirian anak (Praba, 2011).

Rendahnya tingkat pendidikan, pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang dimiliki orang tua (keluarga) dan guru di sekolah dalam memahami berbagai permasalahan yang dimiliki atau disandang oleh anak. Selain itu,

masih terbatasnya kemampuan dalam hal pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang dimiliki orang tua (keluarga), dan guru di sekolah dalam menggunakan metode, teknik, dan cara untuk mengatasi permasalahan kebutuhan anak sesuai dengan tugas perkembangannya sehingga perlu adanya peningkatan fungsi dan peran sosial dalam membina kemandirian anak (Sunanto, 2006)

- c. Belum optimalnya pembinaan kemandirian anak yang diberikan oleh lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah serta masyarakat selama ini.
- d. Pihak keluarga, masyarakat, dan pemerintah masih terbatas dalam memberikan pelayanan sosial terhadap permasalahan-permasalahan sosial anak masih terbatas
- e. Program pelatihan yang diselenggarakan untuk pembinaan orang tua (keluarga) dan guru (pihak sekolah) serta masyarakat pada saat ini relatif sedikit.
- f. Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan bagi anak yang menyandang masalah sosial, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah relatif masih sedikit.
- g. Rendahnya angka partisipasi masyarakat dalam memberikan pelayanan, pembinaan, dan bimbingan dalam mengatasi masalah sosial anak.

Belum terbentuknya program pelatihan terpadu yang bersifat konsisten, terintegrasi, dan berkelanjutan antara pemerintah, keluarga, masyarakat, dan sekolah dalam upaya peningkatan fungsi dan peran sosial anak dalam pembinaan kemandirian. .

- b. Berdasarkan uraian tersebut di atas peneliti menganggap perlu adanya sebuah pengembangan model pelatihan terpadu dalam upaya peningkatan fungsi dan peran sosial anak dalam pembinaan kemandirian.

2. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Penulis merumuskan masalah yang akan diteliti agar memperjelas penelitian yang hendak dilakukan dan agar permasalahan yang diteliti tidak terlalu luas dan disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki penulis.

Adapun pertanyaan penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut ini.

- a. Bagaimana profil pembinaan dan proses penyelenggaraan pelatihan terpadu di Rumah Perlindungan Sosial Petirahan Anak (RPSPA)?
- b. Bagaimana model konseptual pelatihan terpadu dalam upaya meningkatkan fungsi dan peran sosial anak dalam membina kemandirian anak di Rumah Perlindungan Sosial Petirahan Anak (RPSPA)?
- c. Bagaimana implementasi model pelatihan terpadu dalam upaya meningkatkan fungsi dan peran sosial anak dalam membina kemandirian anak di Rumah Perlindungan Sosial Petirahan Anak (RPSPA)?
- d. Bagaimana efektivitas model pelatihan terpadu dalam upaya meningkatkan fungsi dan peran sosial anak dalam membina kemandirian anak di Rumah Perlindungan Sosial Petirahan Anak (RPSPA)?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model pelatihan terpadu dalam upaya meningkatkan fungsi dan peran sosial anak dalam

membina kemandirian anak di RPSPA. Mengacu pada tujuan umum, tujuan studi ini secara terperinci adalah sebagai berikut ini.

1. Untuk menggambarkan mengenai profil pembinaan dan proses penyelenggaraan pelatihan terpadu di RPSPA.
2. Untuk menggambarkan mengenai model konseptual pelatihan terpadu dalam upaya meningkatkan fungsi dan peran sosial anak dalam membina kemandirian anak di RPSPA.
3. Untuk menggambarkan mengenai implementasi model pelatihan terpadu dalam upaya meningkatkan fungsi dan peran sosial anak dalam membina kemandirian anak di RPSPA.
4. Untuk menggambarkan mengenai efektivitas model pelatihan terpadu dalam upaya meningkatkan fungsi dan peran sosial anak dalam membina kemandirian anak di RPSPA.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut ini.

1. Teoritis
 - a. Mengembangkan konsep kemandirian
 - b. Mengembangkan konsep-konsep keilmuan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) dan mengembangkan konsep pelatihan mengenai konsep pelatihan terpadu serta proses pelatihan terpadu, baik dari segi program maupun pembelajarannya.
 - c. Mengembangkan konsep fungsi dan peran sosial anak.

d. Penelitian ini diharapkan memberikan penyempurnaan terhadap teori dalam pelatihan terpadu yang diberikan kepada anak untuk meningkatkan fungsi dan peran sosial serta kemandirian anak.

2. Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi penyelenggaraan pelatihan terpadu dan bagi organisasi-organisasi yang mempunyai fungsi yang sama. Selain itu, dapat memberikan sebuah kontribusi dalam menyempurnakan pelaksanaan program pelatihan terpadu bagi anak dalam upaya menumbuhkan dan meningkatkan fungsi dan peran sosial dalam membina kemandirian anak.

b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya mengenai pelatihan terpadu pada jalur pendidikan luar sekolah.

E. Definisi Istilah

1. Kemandirian

Barnadib (1987:72) berpendapat bahwa kemandirian merupakan perilaku seseorang yang mampu berinisiatif dan mampu mengatasi masalah, hambatan, dan tantangan, mempunyai rasa kepercayaan diri dalam melakukan sesuatu tanpa mengandalkan bantuan orang lain serta memiliki hasrat berkompetisi untuk maju demi kebaikan dirinya. Havighurst (1972) berpendapat kemandirian merupakan kemampuan seseorang untuk mengontrol emosi dan ekonomi, serta memiliki kemampuan berinteraksi sosial secara aktif juga dapat menggunakan kemampuan intelektualnya dalam mengatasi berbagai masalah.

Dalam psikologi perkembangan, istilah mandiri disamakan dengan *independence*. Namun ada istilah lain yang maknanya hampir sama yaitu *autonomi*. Steinberg dalam Sunanto (2006) menjelaskan, *independence* (mandiri) secara umum menunjuk kepada kemampuan individu untuk menjalankan atau melakukan sendiri aktivitas hidup terlepas dari pengaruh kontrol orang lain.

Steinberg dalam Sunanto, kemandirian merupakan salah satu tugas perkembangan yang mencakup kemandirian emosional, kemandirian tingkah laku, dan kemandirian nilai. Kemandirian emosional merupakan aspek kemandirian yang berhubungan dengan perubahan kedekatan hubungan emosional antar individu seperti hubungan emosional dengan orangtua.

Kemandirian tingkah laku adalah suatu kemampuan untuk membuat keputusan tanpa bergantung kepada orang lain dan melakukannya secara bertanggung jawab. Sedangkan kemandirian nilai adalah kemampuan memaknai seperangkat prinsip tentang benar dan salah, tentang apa yang penting dan apa yang tidak penting. Kemandirian juga dapat dibedakan menjadi kemandirian ekonomi, kemandirian belajar, dan kemandirian sosial dan lain-lain. Seseorang yang mandiri secara ekonomi artinya dia memiliki pendapatan yang cukup untuk membiayai kebutuhannya. Kemandirian ekonomi ini dapat juga dipandang sebagai kemandirian pekerjaan karena dengan mandiri pekerjaan berarti memiliki pendapatan. Kemandirian belajar menunjukkan seseorang yang mampu melakukan tugas-tugas belajarnya tanpa tergantung orang lain dan dilakukan secara mandiri. Sedangkan kemandirian sosial adalah kemampuan seseorang

untuk melakukan fungsi sosialnya, artinya dia dapat memiliki kemampuan untuk berinteraksi atau bersosialisasi dengan lingkungan tanpa hambatan yang berarti .

Berdasarkan pengertian para ahli tersebut, dapat didefinisikan bahwa pendidikan kemandirian adalah pendidikan yang membentuk akhlak, watak, budi pekerti pada anak agar memiliki kematangan intelektual, mental spiritual, dan sosial agar tidak tergantung atau bersandar kepada pihak-pihak lain atau orang lain dan memiliki kemampuan dalam menghadapi berbagai situasi.

2. Pelatihan Terpadu

Pelatihan sebagai proses pendidikan jangka pendek yang menggunakan cara dan prosedur yang sistematis dan terorganisir. Para peserta pelatihan akan mempelajari pengetahuan dan keterampilan yang sifatnya praktis untuk tujuan tertentu. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa pelatihan mementingkan adanya proses yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau tujuannya. Sejalan dengan itu, pelatihan dan pengembangan menurut Wasbodo (1999: 22) merupakan salah suatu praktek bagi sumber daya manusia yang berfokus pada identifikasi, pengkajian serta melalui proses belajar yang terencana, berupaya untuk membantu mengembangkan kemampuan agar dapat melakukan pekerjaan di masa ini atau di masa yang akan datang. Graigh (1996) mendefinisikan pelatihan sebagai pengalihan pengetahuan dan keterampilan dari seseorang kepada orang lain.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut di atas, dapat didefinisikan bahwa pelatihan merupakan proses kegiatan secara sadar untuk memperbaiki sumber

daya manusia baik individu maupun kelompok dengan tujuan untuk meningkatkan aspek-aspek kemampuan intelektual, kepribadian mandiri, dan keterampilan khusus yang diharapkan untuk masa yang akan datang.

The National Academic of Sport Medicine berpendapat pelatihan terpadu merupakan suatu program pengondisian kembali dan pengrehabilitasian kembali yang dapat dilakukan terhadap semua klien dengan berbagai tujuan.

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat didefinisikan pelatihan terpadu dalam hal ini adalah suatu proses kegiatan yang menciptakan kondisi, stimulus, dan pengrehabilitasian melalui bimbingan, pembinaan, dan atau latihan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap pada anak dengan memadukan antar materi pembelajaran dan materi pembinaan dengan menggunakan pendekatan pembelajaran terpadu yaitu dengan mengaitkan dan memadukan materi ajar dalam suatu mata pelajaran atau antarmata pelajaran dengan semua aspek perkembangan anak, kebutuhan, minat anak, serta kebutuhan dan tuntutan lingkungan sosial keluarga, melalui peran serta pendidik, instruktur, pembina, dan keluarga secara sistematis, terorganisir, dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan fungsi dan peran sosial anak untuk mencapai kemandirian.

3. Fungsi dan Peran Sosial

Menurut Linton (1984:148) fungsi sosial telah melekat dalam setiap individu, karena itu merupakan suatu kebutuhan dasar. Fungsi sosial akan berjalan dengan baik dengan adanya pola-pola tingkah-laku timbal balik antara individu-

individu atau kelompok-kelompok individu. Posisi yang saling berhadapan di dalam pola tingkah laku timbal-balik semacam itu, secara teknik disebut “status”.

Berbeda dengan fungsi sosial, peran sosial lebih dinamis daripada status. Dalam hidup bermasyarakat, individu menerima suatu status dan mendudukinya dalam kaitannya dengan status-status lain. Apabila ia melaksanakan hak dan kewajiban yang melekat pada status itu, maka ini berarti ia sudah melakukan sebuah peran sosial. Peran dan status sosial tidak dapat dipisahkan. Perbedaan antara kedua hal ini hanyalah merupakan “*academic interest*” saja. Tidak ada status sosial tanpa peran sosial, dan tidak ada pula peran sosial tanpa status sosial (Linton, 1984: 149).

4. Anak Sebagai Makhluk Sosial

Filsafat tentang perkembangan dan pertumbuhan anak disamping memperhatikan individualitas anak, juga harus memperhatikan masyarakat tempat ia diasuh dan didewasakan. Lingkungan sosial inilah yang memberikan fasilitas dan arena bermain pada anak untuk pelaksanaan realisasi-diri. Seorang anak yang berdiri sendiri dan terpisah secara total dari masyarakat akan mengakibatkan anak tidak dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal karena tidak adanya bantuan orang dewasa atau manusia lain di lingkungan sosialnya.

Oleh sebab itu, humanitas atau kemanusiaan tersebut bukan “murni milik pribadi”, akan tetapi merupakan suatu taraf yang berproses dalam lingkungan manusia. Anak akan menemukan jati diri sendiri dalam relasinya dengan manusia lain; terutama dalam relasi dengan ibu, ayah, kakak, keluarga dekat, dan

lingkungan tetangga. Selain itu, anak akan menghayati rasa malu, tersudut, dan kehilangan martabat diri dalam sebuah lingkungan sosial.

Seorang anak manusia tidak mungkin bertahan hidup (*survive*) tanpa masyarakat dan lingkungan sosial tertentu. Anak dilahirkan, dirawat, dididik, tumbuh kembang, dan bertingkah laku sesuai dengan martabat manusiawi dalam lingkungan kultural sekelompok manusia, maka keluarga (ayah, ibu, anak, dan saudara) dan lingkungan sosial dihayati oleh anak sebagai bagian dari dirinya sendiri. Oleh sebab itu, anak manusia adalah individu sosial yang harus hidup di tengah lingkungan sosial.

Kartono (2003) berpendapat, individualitas dan sosial itu adalah “unsur-unsur” yang komplementer (saling mengisi dan melengkapi) dalam eksistensi anak. Anak sebagai individu tidak mungkin bisa berkembang tanpa bantuan orang lain dan kehidupan anak bisa berlangsung, jika dia ada bersama dengan orang lain.

Kondisi dan situasi sosial akan menguntungkan dan positif bagi anak. Apabila kombinasi dari pengaruh lingkungan sosial dan semua potensi psiko-fisik anak bisa bekerja sama secara baik dan bisa merealisasikan diri serta proses sosialisasi anak sebagai manusia. Selanjutnya, kondisi ini menjadi tidak sehat dan tidak menguntungkan apabila perkembangan anak menjadi terhambat atau rusak oleh pengaruh-pengaruh dari luar.

Anak merupakan pribadi sosial yang memerlukan relasi dan komunikasi dengan orang lain untuk memanusiakan dirinya. Anak ingin dicintai, diakui, dan dihargai. Anak juga berkeinginan untuk diperhitungkan dan mendapatkan tempat

dari kelompoknya. Hanya dalam komunikasi dan relasi dengan orang lain (guru, pendidik, pengasuh, orang tua, anggota keluarga, kawan sebaya, kelompoknya dan lain-lain) dia bisa berkembang menuju kepada kedewasaan.

Hubungan anak dengan orang dewasa, juga orang tua adalah relasi timbal balik dan saling mempengaruhi. Setiap ulah anak selalu dikaitkan dengan satu *kader-referensi manusia*. Jelasnya, individu sosial dengan tingkah laku sosial itu selalu dikomunikasikan dengan manusia lain. Individualitas anak dan ciri sosial sosialitas anak mempunyai peran yang sama penting. Keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Namun, keduanya masih dapat dibedakan untuk kemudahan pemahaman pribadi anak.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, fungsi dan peran sosial anak adalah kemampuan seorang anak dalam merealisasikan diri pada lingkungan sosialnya sebagai proses menemukan jati diri, melalui komunikasi dan relasi dengan orang lain serta proses sosialisasi yang mengkombinasikan antara pengaruh lingkungan sosial dan semua potensi psiko-fisiknya menuju kepada kedewasaan. Dengan demikian dapat didefinisikan, fungsi dan peran sosial pada anak adalah kemampuan anak dalam menjalankan peranan-peranan sesuai dengan status yang disandangnya, dengan penuh rasa tanggungjawab baik terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat, sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku serta tahap perkembangan anak.

F. Kerangka Berpikir

Anak merupakan tunas bangsa yang akan meneruskan cita-cita perjuangan dalam pembangunan bangsa dan negara. Oleh karena itu, sebagai potensi manusia yang masih murni, mereka harus dilindungi, dibimbing, dibina, dan diarahkan dengan benar. Namun, hal ini tidak sesuai dengan kenyataan karena berbagai alasan banyak anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan, baik yang dilatarbelakangi masalah sosial, ekonomi, psikologi, dan pedagogi. Adapun faktor-faktor penyebab dan penghambat masalah tersebut diakibatkan oleh pemerintah, keluarga, dan masyarakat. Hal ini seperti disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada Bab IV Pasal 11, sebagai berikut ini.

1. Usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi.
2. Usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat.
3. Usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat dilaksanakan baik didalam maupun diluar panti.
4. Pemerintah mengadakan pengarahan, bimbingan, bantuan dan pengawasan terhadap usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh masyarakat.

Unsur yang paling penting dalam usaha pembinaan untuk mencapai kesejahteraan anak adalah keluarga. Hal ini mengingat keluarga merupakan basis pertama dan utama dalam pembinaan kesejahteraan anak. Akan tetapi, pada kenyataannya banyak keluarga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar anak dengan baik. Bahkan, ada di antaranya yang menelantarkan anaknya padahal anak memerlukan kondisi memadai yang memungkinkan anak tersebut untuk tumbuh dan berkembang secara wajar.

Dalam upaya mengatasi masalah tersebut, diperlukan adanya tindakan dan upaya sinergitas dari ketiga komponen yaitu keluarga, masyarakat, dan

pemerintah. Salah satu upaya pemerintah dengan mendirikan suatu panti sosial yang berfungsi sebagai lembaga penyelenggara pendidikan. Muhidin (1992: 42) mengatakan pelayanan sosial sebagai suatu aktivitas terorganisir yang bertujuan untuk menolong orang-orang agar mendapatkan suatu penyesuaian timbal balik antara individu dan lingkungan sosialnya. Tujuan ini dapat dicapai melalui teknik dan metode yang diciptakan untuk meningkatkan individu, kelompok, dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dalam mengatasi masalah penyesuaian sebagai akibat dari pola-pola perubahan masyarakat. Hal tersebut dilakukan melalui tindakan pola-pola perubahan masyarakat dan melalui tindakan-tindakan untuk meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi.

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Sosial telah berupaya dalam pembinaan terhadap anak yang mengalami hambatan pada fungsi dan peran sosial serta kemandiriannya. Salah satu bentuk kegiatan tersebut yaitu melalui pembinaan dan bimbingan sosial di Rumah Perlindungan Sosial Petirahan Anak (RPSPA) Garut. Mengingat anak yang dibina di RPSPA adalah anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan fisik, psikis, sosial, maupun pedagogis serta masih dalam status siswa sekolah dasar maka pelayanan yang diberikan dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

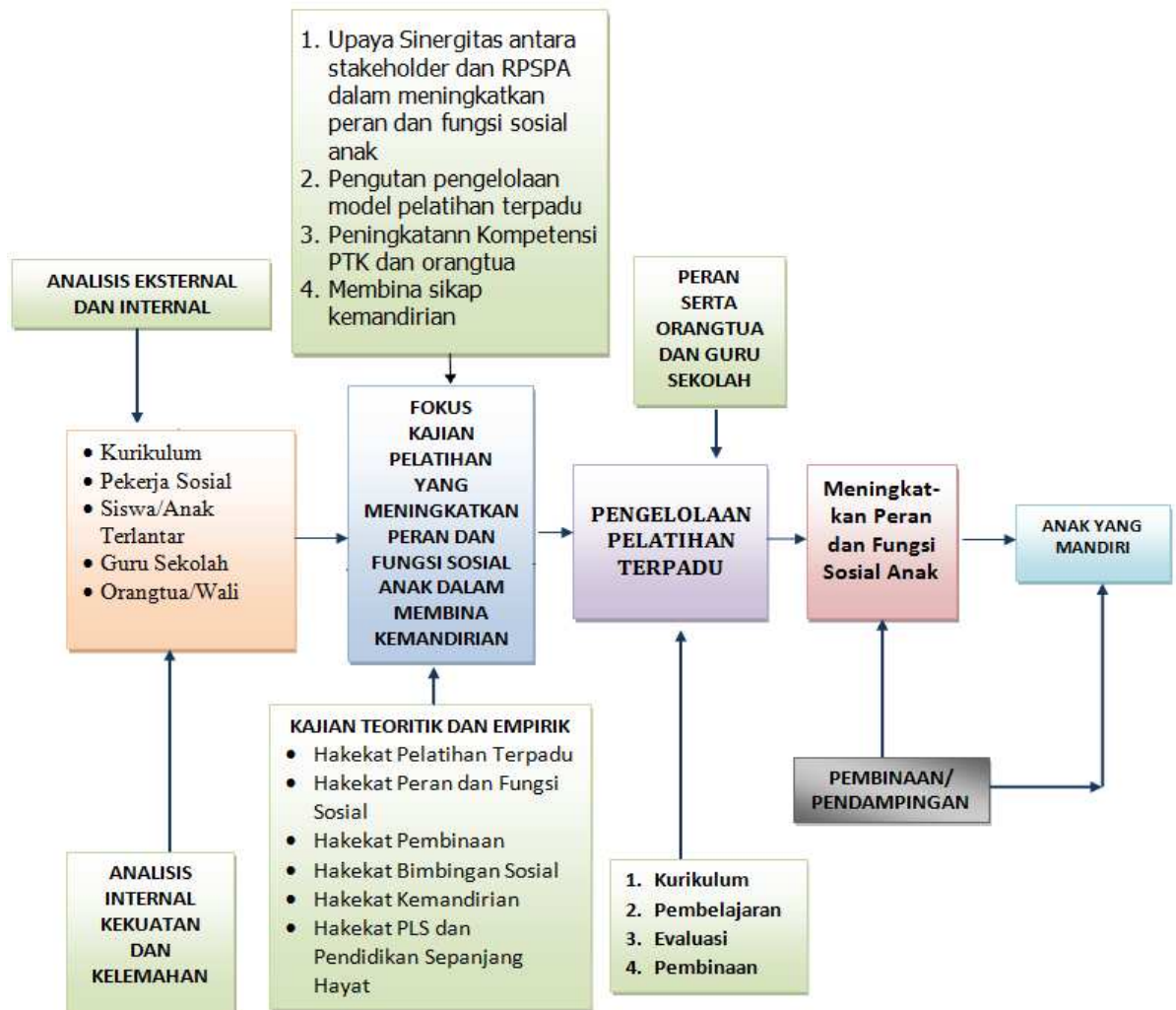
1. Asuhan, meliputi pengasramaan, pemberian makan bergizi, kesehatan dan pembinaan hidup teratur dalam keluarga dan lingkungannya,
2. Bimbingan, meliputi bimbingan sosial, bimbingan, mental dan fisik, bimbingan belajar, bimbingan keterampilan, bimbingan keperamukaan, bimbingan bakat dan kreatifitas.

Kegiatan penelitian dan pengembangan ini antara lain didasarkan kepada kondisi penyelenggaraan pelatihan di RPSPA Cisurupan Garut. Di tempat ini digunakan pendekatan analisis SWOT. Namun, masih ditemukan berbagai masalah atau kelemahan dalam bentuk model pelatihan dan komponen-komponen pelatihan di RPSPA. Rumusan masalah yang dikemukakan merupakan fokus penelitian yang diupayakan untuk menemukan solusinya melalui pengembangan model konseptual pelatihan terpadu.

Kerangka berpikir penelitiannya digambarkan berdasarkan permasalahan faktual serta konsep-konsep teoritis yang ada dan dikembangkan menjadi satu konsep Model Pelatihan Terpadu untuk Meningkatkan Fungsi dan Peran Sosial Anak dalam Membina Kemandirian. Model ini berdasar pada konsep program pendidikan luar sekolah dan konsep pelatihan. Kerangka berpikir dalam penelitian dan pengembangan dibangun melalui beberapa komponen yang menjadi satu kesatuan atau model pelatihan terpadu yang meliputi: kurikulum, pekerja sosial, anak/siswa terlantar, orang tua/wali anak siswa terlantar, dan guru pendamping.

Proses pelatihan terpadu dilakukan dengan melibatkan komponen tersebut di atas dengan memfokuskan peningkatan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap pada guru dan orang tua/wali dari anak peserta pelatihan agar memahami dan memiliki kemampuan dalam membina anak pasca mengikuti pelatihan di RPSPA sehingga orang tua dan guru dapat melanjutkan metode dan teknik pembinaan anak yang tepat sesuai dengan kebutuhan, kasus atau permasalahan pada anak. *Outcome*: anak peserta pelatihan meningkat fungsi dan peran sosialnya sehingga dapat mencapai sikap kemandirian.

Secara skematis, kerangka pikir penelitian ini divisualisasikan pada bagan berikut ini



Bagan 1.1
Kerangka Berpikir Penelitian